



## PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON SELATAN

Laode Muhammad Hasrul Adan<sup>\*1</sup>, La Ode Abdul Wahidin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: [laodehasrul.umb@gmail.com](mailto:laodehasrul.umb@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 03 Juni 2024</p> <p>Revised : 11 Juli 2024</p> <p>Accepted : 01 Agustus 2024</p> <p>Publication : 30 Agustus 2024</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>The need for accountability in regional financial management has driven governments to improve the quality of financial reporting. This study aims to analyze the role of accounting information systems in the quality of financial reports at the Health Office of South Buton Regency. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation and interviews with financial officials/staff directly involved in reporting. The results indicate that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) meets the characteristics of a good accounting information system—namely relevance, accuracy, timeliness, and completeness. Furthermore, the financial reports produced are considered relevant, reliable, comparable, and understandable. These findings imply that SIPD plays a significant role in enhancing the quality of financial reporting, thereby supporting decision-making and promoting accountable and transparent governance.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Accounting Information Systems; Quality Of Financial Reports</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Sistem Informasi Akuntansi; Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p><b>Abstrak:</b> Kebutuhan akan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pejabat/staf keuangan yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah memenuhi indikator sistem informasi akuntansi yang baik, yaitu relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Selain itu, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dinilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan SIPD berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.</p>
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Di setiap negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

Upaya kongrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Oleh karna itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai mengemukakan bahwa sudah menjadi konsekuensi jika laporan keuangan tersebut harus dilaporkan secara terbuka dan aksesibel bagi para pengguna informasi karena laporan keuangan itu merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan mandat dari masyarakat dan mewujudkan *good governance* di pemerintahan daerah itu sendiri.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. Badan pemeriksa keuangan dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (Indriasih, 2014). Setelah itu, laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPRD.

Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari berbagai pertimbangan, hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat lebih baik dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan (Rosdiani, 2011)

Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari informasi yang disajikan dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material sertadapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Ihsanti, 2014)

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 2013). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau subsistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi keuangan guna membantu perusahaan/instansi dalam pembuatan keputusan.

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagian akuntansi dituntut untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Apabila semua faktor telah dipertimbangkan maka perusahaan/instansi mempunyai risiko yang lebih kecil dalam membuat kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat di perbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pada perusahaan maupun pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Keuangan dalam penyusunan Laporan

keuangan tersebut. Dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan menjelaskan mengenai kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang baik adalah pelaporan keuangan yang memenuhi tujuan dari pelapor tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan.

Dalam kerangka Otonomi Daerah dan era keterbukaan informasi, peran data dan informasi menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk dapat menghasilkan informasi keuangan dan aset yang akuntabel, transparan dan auditabel. Untuk menghasilkan informasi-informasi tersebut tentunya memerlukan sistem informasi pengelolaan keuangan termasuk sistem informasi akuntansi yang memadai. Demi mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah agar dapat mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturanyang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya, menuju terwujudnya good local governance.

Kabupaten Buton Selatan merupakan Daerah Otonomi baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014. Pemekaran tersebut untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Buton Selatan Pada khususnya. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan dimaksudkan agar meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.

Saat ini pihak Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menerapkan aplikasi SIPD tersebut dalam kegiatan laporan keuangannya. Seluruh dinas-dinas dituntut untuk menginput laporan keuangannya. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Dari hasil pengamatan penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, saat ini pihak Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan juga turut menginformasikan laporan keuangannya melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul

penelitian “Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan”

## **METHOD**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian sampel yang di gunakan Kepala bagian keuangan dan staf akuntansi yang bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun analisis data dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Kualitas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan**

Pelaporan Keuangan Daerah di Kab. Buton Selatan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung jawaban atas penggunaan APBD oleh pemerintah daerah setempat, maka setiap pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam membantu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka Kementerian Dalam Negeri menciptakan sebuah aplikasi yang di beri nama Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD ) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019

Penelitian ini akan membahas dan berfokus pada peran sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan melalui dua indikator variabel tersebut. Dalam penelitian ini, ciri sistem informasi akuntansi yang digunakan yaitu relevan, tepat waktu, akurat, dan

lengkap. Sedangkan untuk kualitas laporan keuangan dengan indikator dapat dipahami, relevan, dapat dibandingkan dan andal.

1. Laporan keuangan yang relevan
2. Laporan keuangan yang andal
3. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan
4. Laporan keuangan yang dapat dipahami

Berikut ini hasil wawancara bersama Ibu Umiarni, S.ST sebagai sub bidang keuangan terkait penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). “Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer yang terhubung jaringan internet yaitu dengan aplikasi online SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) tersebut hanya digunakan oleh kepala dinas, penata usaha keuangan dan bendahara (Umiarni, 21 September 2023). Dokumen Pendukung Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat perlu di atur informasi pemerintah daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Hasil wawancara tersebut, ditambahkan oleh ibu Fitriani, SE., terkait proses penggunaan sistem informasi akuntansi sebagai berikut: “Proses penggunaan sistem informasi akuntansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, melalui aplikasi SIPD dengan pengajuan pencairan atau sistem GU (Ganti Uang) dan Sistem LS (Pembayaran Langsung). Baik sistem GU dan LS, sama-sama menggunakan prosedur dan alur yang sudah ditetapkan secara berurutan, sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan rencana anggaran tahun berjalan. (Fitriani, 21 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Umiarni dan ibu Fitriani Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan telah memenuhi ciri relevan yaitu kualitas penggunaan Sistem Informasi Akuntansi telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam struktur organisasi.

Dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer, staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIPD dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan. Hal ini tersirat dalam hasil wawancara bersama Ibu Umiarni sebagai berikut: “Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan

pekerjaan terkait menyusun, mencatat, dan menyelesaikan laporan keuangan, karena penggunaan aplikasi tersebut sangat otomatis. Dalam arti, semua angka keuangan yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut terumus langsung atau otomatis.” (Umiarni, 21 September 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Fitriani, SE., sebagai Sub Bidang Umum dan kepegawaian, berikut hasil wawancaranya “Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD menghasilkan data yang valid, akan tetapi harus kembali dicocokkan dengan data manual atau data bantu”. (Fitriani, 21 September 2023)

Merujuk kedua hasil wawancara tersebut di atas terkait penggunaan dan manfaat Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Sistem Informasi Akuntansi telah memenuhi indikator ciri akurat. Akurat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang diuji oleh dua orang yang berbeda atau lebih, yang sama-sama menggunakan aplikasi yang sama.

Setelah memenuhi ciri Akurat, Sistem Informasi Akuntansi juga harus memenuhi ciri tepat waktu (*timely*). Hal inipun juga disampaikan oleh ibu Fitriani dan Umiarni dalam wawancara sebagai berikut: “Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD ini sangat memudahkan mendapatkan data yang valid dan minim kesalahan, efisiensi waktu dan mempercepat menyelesaikan pekerjaan (Fitriani).

Selain itu sangat membantu dan memudahkan pekerjaan bendahara. Penginputan data harus dilakukan secara teliti, telaten, dan hati-hati. Penggunaan SIA melalui SIPD ini bisa dibilang cepat. Contohnya, pencairan untuk Sistem LS dan Sistem GU, Jika diajukan hari senin, maka sistem akan memberikan informasi pada hari itu juga”. (Umiarni, 21 September 2023) Bersumber pada hasil wawancara tersebut, Sistem Informasi Akuntansi dengan aplikasi SIPD telah memenuhi ciri tepat waktu (*Timely*) dalam sistem informasi akuntansi karena penggunaannya yang sangat membantu, memudahkan, dan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan bendahara. Artinya penggunaan SIA dengan aplikasi SIPD memberikan informasi yang ada pada saat diperlukan atau tersedianya informasi saat itu pula.

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD juga cukup lengkap, hal tersebut diungkapkan oleh ibu Fitriani dan Umiarni Berikut ini hasil wawancara; “Dengan adanya Sitem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD, cukup lengkap sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan terkait keuangan karena didalam aplikasi tersebut ada beberapa menu yang berbeda sesuai kebutuhan salah

satunya menu pencairan gaji. Sistem harus mengikuti alur/flowchart akuntansi yang telah ditetapkan (Fitriani, 21 September 2023) “Selain itu ada kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai sistem mengatur keuangan. Ada tanggungjawab pada bidang masing-masing yang tersedia pada menu seperti pada menu pengeluaran dipegang oleh bendahara pengeluaran dan menu penerimaan pada bidang bendahara penerimaan, yang menurut saya lengkap secara sistem” (Umiarni, 21 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diungkapkan oleh kedua narasumber terkait Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan cukup lengkap. Dengan adanya informasi yang ditampilkan atau disajikan dalam menu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), maka ciri lengkap telah memenuhi sistem informasi akuntansi yang digunakan. Sistem Informasi Akuntansi juga memiliki kendala dan resiko dalam penggunaannya. Ada beberapa resiko dan kendala yang dapat terjadi dalam penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dengan koneksi jaringan internet. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Umiarni, sebagai berikut: “Kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIDP, adalah ketika listrik padam, komputer error dan jaringan internet lemot. Jadi ketika ketiga kendala tersebut terjadi maka penggunaan SIA melalui SIPD tersebut tidak bisa digunakan. Resikonya ketika komputer error, kami takut kehilangan data, selain itu dalam penggunaan SIA, Kami harus lebih teliti dan hati-hati karena jika sudah terinput tidak bisa dihapus lagi” (Umiarni, 21 September 2023)

Hasil wawancara tersebut di atas, menjelaskan kendala dan risiko yang dialami oleh pengguna Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIDP. Kendala dan risiko tersebut dialami oleh semua pengguna SIA berbasis komputer. Maka dari itu, perlu adanya penanganan dan pengembangan teknologi yang mendukung penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIDP masih dianggap cukup efektif, dikarenakan adanya beberapa kendala dan resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Umiarni dalam wawancara yang dilakukan; “Meskipun telah menggunakan Sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIDP), penggunaan sistem ini cukup efektif, karena belum adanya rencana penanganan ketika terjadi kendala atau resiko seperti, penggunaan laptop yang ketika listrik padam, laptop masih bisa bertahan dengan kekuatan battereynya atau penggunaan genzet dan *backup* data sebelum listrik padam. Namun penggunaan Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIDP), memiliki peran penting dalam setiap menyusun laporan

keuangan karena dengan adanya aplikasi ini, laporan tersusun rapi” (Umiarni, 21 September 2023)

Merujuk hasil wawancara tersebut, penggunaan Sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), cukup efektif, dan sangat membantu staf keuangan (bendahara) dalam menyusun laporan keuangan meskipun belum ada penanganan ketika terjadi kendala atau resiko seperti, penggunaan laptop yang ketika listrik padam, laptop masih bisa bertahan dengan kekuatan battereynya atau penggunaan genzet dan *backup* data sebelum listrik padam.. Berdasarkan hasil wawancara menyeluruh terkait Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan disimpulkan, kualitas sistem informasi akuntansi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diterapkan cukup efektif, sangat berperan dalam menyusun laporan keuangan dan telah memenuhi ciri/indikator . Selanjutnya penulis menindak lanjuti variabel kualitas laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber: “Penyusunan laporan keuangan telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu (*feedback value*) dan mampu menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, selain itu sistem yang digunakan telah menyajikan laporan keuangan yang cukup lengkap”. (Fitriani, 21 September 2023)

Hasil wawancara tersebut menyebutkan untuk kualitas laporan keuangan melalui sistem yang digunakan dapat digunakan untuk mengoreksi aktivitas keuangan sebelumnya dan dapat menyelesaikan laporan tepat waktu dan memberikan informasi laporan keuangan yang cukup lengkap. Artinya, kualitas laporan keuangan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi indikator relevan.

Kualitas laporan keuangan meskipun memenuhi informasi yang mungkin relevan, tetapi jika tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat meyesatkan dan kemungkinan terjadi kesalahan yang harus diverifikasi. Maka dari itu, laporan keuangan dapat disebut berkualitas jika memenuhi indikator andal (*reliability*). Hal ini juga diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Tersirat dalam hasil wawancara bersama Ibu Fitriani dan Ibu Umiarni sebagai berikut: “Setiap Transaksi laporan keuangan yang disajikan sangat transparan atau jujur dan informasi yang disajikan bebas dari kesalahan yang bersifat material” (Fitriani, 2 September 2023)“Di kantor ini (Dinas Kesehatan) menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan

umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus. Disamping itu, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji”. (Umiarni, 21 September 2023)

Bersumber dari dua narasumber tersebut tampak tersirat dari hasil wawancara di atas, kualitas laporan keuangan yang diterapkan dapat diandalkan karena menyajikan informasi yang jujur, bebas dari kesalahan material dan dapat diuji. Ini bermakna penerapan kualitas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah, memenuhi indikator keterandalan (*Reliability*).

Tidak hanya relevan dan andal, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dalam menerapkan kualitas laporan keuangan, Sub bidang Keuangan dan Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mengungkapkan penyusunan laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Hal tersebut dijelaskan dalam hasil wawancara berikut: “Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun akan selalu dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, guna memastikan laporan tersebut sesuai atau tidak” (Umiarni, 21 September 2023). “Dalam penyusunan laporan keuangan, disusun secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengevaluasi keputusan masa lalu (*Feedback Value*). Selain itu, penyusunan laporan keuangan juga menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun”. (Fitriani, 21 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan informasi salam laporan keuangan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan entitas pelaporan lain pada umumnya serta menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Maka dapat dimaknai bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi indikator kualitas laporan keuangan yaitu dapat dibandingkan.

Disamping itu, kualitas laporan keuangan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, mudah dipahami. Hal tersebut juga diungkapkan oleh narasumber dalam hasil wawancara berikut: “Penyusunan laporan keuangan dibuat secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami, dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang digunakan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna sehingga dapat dipahami” (Fitriani, 21 September 2023)

Melalui hasil wawancara tersebut di atas, diungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan yang diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi indikator dapat dipahami. Artinya penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan

pemahaman penggunaannya sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Bagi narasumber, dengan penerapan kualitas laporan keuangan yang memenuhi indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sangat membantu dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Fitriani sebagai berikut: “Kualitas laporan keuangan sangat berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan karena memudahkan dalam pengambilan keputusan”. (Fitriani, 21 September 2023). Merujuk hasil wawancara tersebut, dapat diketahui peran penting penerapan kualitas laporan keuangan yaitu sebagai untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan terkait penerapan Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi indikator kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta penerapan kualitas laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan.

## **Pembahasan**

1. Laporan keuangan yang relevan. Sebuah laporan keuangan agar dapat dikatakan relevan jika keputusan pengguna dapat dipengaruhi oleh informasi yang terdapat di dalamnya dengan membantu mengevaluasi peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa kini, dapat memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi tersebut.
  - a. Memiliki Manfaat Umpan Balik. Bentuk laporan keuangan yang dikatakan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) adalah pengguna anggaran maupun masyarakat umum dapat mengetahui hasil kinerja laporan yang kami buat dan dapat memberikan saran ataupun masukan. Pemerintah daerah kabupaten buton selatan telah menyajikan laporan keuangan yang memiliki *feedback value*. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi yang cukup diberikan kepada para pengguna laporan keuangan untuk mengoreksi atas kinerja dari pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi dari laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
  - b. Memiliki Manfaat prediktif. Secara umum tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan dimanfaatkan untuk menentukan

kebijakan dan juga dapat membantu memperkirakan kualitas dari kinerja pemerintah di masa yang akan datang.

- c. Tepat Waktu. Yang di maksud tepat waktu di sini adalah dalam pelaporan keuangan entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan menyerahkannya kepada badan yang memeriksanya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh regulasi terkait.
- d. Lengkap. Kelengkapan dari pelaporan keuangan haruslah termuat informasi akuntansi dari keuangan pemerintah yang di sajikan selengkap mungkin, yakni mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan nantinya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah Kab. Buton Selatan di lakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah. Salah satu yang menjadi prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah pengungkapan lengkap/penuh. Prinsip pengungkapan penuh menyatakan bahwa laporan keuangan menyediakan pengguna dengan laporan lengkap yang mereka butuhkan.

## 2. Laporan Keuangan Yang Andal.

Sebuah laporan keuangan dapat di katakan andal jika informasi yang terdapat dalam laporan. Fakta dengan jujur dan dapat di verifikasi. Penyajian Jujur. Suatu laporan keuangan dapat di lakukan apabila memuat informasi yang benar dan transaksi akuntansi serta berbagai kegiatan lainnya yang di sajikan dengan cara yang cukup di ungkapkan. Keberadaan LKPD Kab. Buton Selatan sudah di laksanakan dengan baik dan penyajian secara jujur baik dalam hal informasi, transaksi dan peristiwa yang terjadi lainnya. LKPD Kab. Buton Selatan di sajikan secara wajar dan memenuhi kualitas laporan keuangan secara jujur.

## 3. Laporan Keuangan Yang Dapat Di Bandingkan.

Informasi laporan keuangan yang berkualitas jika dapat di bandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya.

## 4. Laporan Keuangan Yang Dapat Di Pahami.

Pemahaman akan membaca sebuah laporan keuangan atau pengetahuan untuk menerjemahkan isi dari laporan keuangan di perlukan oleh pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Bentuk laporan keuangan pada dasarnya sama karna sudah di atur dalam pedoman pengelolaan keuangan, sehingga dalam

membuat laporan keuangan bentuknya harus dapat di pahami serta istilah yang terdapat dalam laporan keuangan dapat lebih mudah di mengerti oleh semua orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten buton Selatan, telah memenuhi indikator/cirri dari sistem informasi akuntansi yang diuraikan oleh Romney dan Steinbart (Romney & Steinbarth, 2015) yaitu relevan, akurat, tepat waktu dan lengkap. Dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang cukup efektif, sangat membantu dan memudahkan penyusunan laporan keuangan karena secara sistematis menyusun laporan keuangan dengan rapi atau terstruktur. Begitupula dengan penerapan kualitas laporan keuangan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Melalui empat indikator tersebut, kualitas laporan keuangan menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan antara peran sistem informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan dan cukup efektif untuk digunakan. Semakin berperan sistem informasi akuntansi yang di terapkan maka semakin berkualitas laporan keuangan dihasilkan. Dengan adanya peran Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, sehingga dalam pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan dapat disesuaikan dengan Sistem Standar Akuntansi Pemerintah.

Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan dan cukup efektif untuk digunakan. Semakin berperan sistem informasi akuntansi yang di terapkan maka semakin berkualitas laporan keuangan dihasilkan. Dengan adanya peran Sistem Informasi Akuntansi melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, sehingga dalam pelaporan/pertanggungjawaban . laporan keuangan dapat disesuaikan dengan Sistem Standar Akuntansi Pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti Mandasari dengan judul penelitian Peranan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT Sinar Galesong Sinar Mandiri yang menyimpulkan,

bahwa peran sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 59.8% (Mandasari, 2017) asil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfah dkk dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara yang menyimpulkan Sistem Informasi Akuntansi memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kualitas palaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara (Zulfah et al., 2017). Selain itu penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penellitian yang dilakukan oleh Gafur dkk yang menyimpulkan Sistem Informasi Akuntansi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Gafur et al., 2016)

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Komponen utama dari SIA, seperti keakuratan data, keandalan sistem, kecepatan proses, dan kemudahan akses informasi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap aspek-aspek pelaporan keuangan yang meliputi relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan kemudahan dipahami.

Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik memungkinkan pengelolaan data keuangan dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan pertanggungjawaban publik, khususnya dalam lingkungan organisasi sektor publik seperti dinas kesehatan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peningkatan efektivitas sistem informasi akuntansi secara langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang andal, berbasis teknologi, serta didukung oleh SDM yang kompeten merupakan langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan.

## REFERENCES

Gafur, S., Yusuf, A., & Lamaya, F. (2016). PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

- INTERNAL AUDIT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS SKPD SE-KOTA KUPANG). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 3(3).
- Ihsanti, E. (2014). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KAB. LIMA PULUH KOTA). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Indriasih, D. (2014). THE EFFECT OF GOVERNMENT APPARATUS COMPETENCE AND THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL TOWARD THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING IN LOCAL GOVERNMENT. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20).
- Kurniawan, M. (2013). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA ORGANISASI PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Mandasari, A. (2017). *PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PT. SINAR GALESONG MANDIRI*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Romney, M. B., & Steinbarth, P. J. (2015). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. (K. S. N. Safira, N. Puspasari, & Empat. (eds.); Edisi 13). Salemba Empat.
- Rosdiani, H. T. (2011). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL AUDIT LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE*. [Universitas Negeri Syarif Hidayatullah]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4055/1/HAYYUNING\\_TYAS\\_ROSDIANI-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4055/1/HAYYUNING_TYAS_ROSDIANI-FEB.pdf)
- Zulfah, I., Wahyuni, S., & Nurfaza, A. (2017). PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKDP KABUPATEN ACEH UTARA. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(2).